

# **DIPLOMASI PUBLIK DAN DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Tren, Tantangan, dan Transformasi dalam Era Kontemporer**

Sofia Trisni

Bima Jon Nanda

Inda Mustika Permata

Eva Ermylina

Tia Mariatul Kibtiah

Reki Harianto

Agung Zulhatta

Fadhila Sudian, Anita A. Sinulingga, Diah A. Austin

Habib Ali Zainal Abidin, Wiwiek Rukmi Dwi Astuti

Rika Isnarti

Maryam Jamilah

Editor :

Sofia Trisni



# DIPLOMASI PUBLIK DAN DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL

**Tren, Tantangan, dan Transformasi dalam Era Kontemporer**

- Penulis** : Sofia Trisni, Bima Jon Nanda, Inda Mustika Permata  
Eva Ermylina, Tia Mariatul Kibtiah, Reki Harianto  
Agung Zulhatta, Fadhila Sudian, Anita A. Sinulingga,  
Diah A. Austin, Habib Ali Zainal Abidin, Wiwiek  
Rukmi Dwi Astuti, Rika Isnarti, Maryam Jamilah
- Editor** : Sofia Trisni
- Desain Cover** : Inda Mustika Permata
- Tata Letak** : Syamsul Hidayat  
Ikhsanul Anwar
- ISBN** : 978-623-172-362-8
- Ukuran Buku** : 15,5 x 23 cm
- Tahun Terbit** : 2024
- Cetakan** : Pertama
- Anggota** : *Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)*

**Dicetak dan diterbitkan oleh :**

*Andalas University Press  
Jl. Situjuh No. 1, Padang 25129  
Telp/Faks. : 0751-27066  
email : cebitunand@gmail.com*

**Hak Cipta Pada Penulis © 2024**

**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.**

*Dilarang mengutip atau memperbanyak sebahagian atau seluruh isi buku tanpa izin  
tertulis dari penerbit*

## PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah S.W.T, kami menawarkan buku ini untuk membantu pembaca memahami dan mengembangkan penelitian tentang diplomasi publik. Buku ini dibuat karena pentingnya diplomasi publik dalam era globalisasi yang kompleks dan saling terhubung. Negara-negara telah menggunakan diplomasi publik sebagai alat strategis untuk membangun citra, mempromosikan kebijakan, dan menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat internasional. Diplomasi publik sangat bergantung pada kemampuan negara untuk berkomunikasi dengan baik dan mempengaruhi opini publik global di tengah arus informasi yang cepat dan besar. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai ide-ide, taktik, dan metode diplomasi publik.

Kami mencoba menggabungkan ide-ide yang relevan dengan studi kasus nyata, baik dari pengalaman Indonesia maupun negara lain. Diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana diplomasi publik dapat digunakan untuk menghadapi tantangan global, memperkuat posisi nasional, dan mendukung tujuan internasional yang lebih besar. Buku ini terdiri dari sebelas bab, yang terdiri dari bab mengenai teori dan bab mengenai contoh aplikasi konsep diplomasi publik. Bagian konseptual memaparkan mengenai Diplomasi publik, Diplomasi Digital, Diplomasi Kota, dan Strategic Narratives. Sementara itu, bagian aplikasi kasus membahas mengenai Opini publik, Diplomasi publik India, Wonderful Indonesia, Hallyu, dan penggunaan Youtube dalam Diplomasi publik. Selain topik mengenai diplomasi publik, buku ini juga memberikan dua bonus bab yang menjelaskan mengenai Diplomasi energi, dan Feminisme.

Pada bab pertama, Sofia Trisni memberikan pemaparan mengenai diplomasi publik secara teoritis. Bab ini menyajikan perkembangan diplomasi publik, kaitannya dengan studi hubungan internasional, dan berbagai pemahaman yang dibutuhkan dalam mempelajari diplomasi publik, seperti aktor-aktor yang terlibat, aktivitas yang dilaksanakan dan hubungan antara diplomasi publik dengan soft power.

Bima Jon Nanda, pada bab 2, membahas mengenai penggunaan media digital dan internet dalam diplomasi untuk mencapai tujuan diplomatik dan berkomunikasi dengan audiens di seluruh dunia. Istilah yang dikenal dengan diplomasi digital ini, memungkinkan komunikasi

yang cepat dan luas melalui platform online seperti media sosial, situs web, dan lainnya. Aktor negara dan non-negara menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya untuk menyampaikan pesan, merespon krisis, untuk mencapai tujuan dan kepentingan aktor tersebut.

Selanjutnya, Ina Mustika Permata, menjelaskan mengenai diplomasi kota, dimana kota sebagai aktor ikut berpartisipasi dalam hubungan internasional. Kota-kota besar seperti New York, Tokyo, dan Jakarta bekerja sama dengan kota-kota lain secara langsung untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, lingkungan, dan budaya. Program seperti ini mendorong kerja sama global, mengatasi berbagai permasalahan dunia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, diplomasi kota mempromosikan identitas lokal dan membuka peluang ekonomi baru melalui jaringan kota global.

Eva Ermylina menulis mengenai *strategic narratives*. Dalam kajian hubungan internasional, *strategic narratives* adalah cerita yang digunakan secara strategis untuk memengaruhi opini dan perilaku publik internasional untuk mendukung tujuan politik dan kebijakan suatu negara. Aktor-aktor hubungan internasional membangun narasi yang menunjukkan nilai, identitas, dan aspirasi mereka dan memproyeksikannya melalui media tradisional dan digital. Narasi ini dapat menciptakan persepsi internasional, citra yang positif, dan dukungan publik. Para aktor dapat memengaruhi pembicaraan internasional dan mencapai tujuan diplomatik dengan menciptakan dan mengontrol narasi pemberitaan yang berkembang dalam masyarakat.

Tia Mariatul Kibtiah mendeskripsikan mengenai opini publik dan kebijakan luar negeri. Di era digital, studi Hubungan Internasional mengekskansi cakupannya termasuk menganalisis opini publik yang memengaruhi kebijakan luar negeri. Persepsi publik penting bagi pemerintah untuk membangun dukungan kebijakan mereka di dalam dan di luar negeri. Teknologi digital dan media mempercepat penyebaran informasi, memungkinkan masyarakat global terlibat dan bereaksi terhadap masalah global secara real-time. Opini publik memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan, negosiasi, dan inisiatif diplomatik. Sebagai respon atas opini publik, negara berusaha memahami dan mengendalikan pendapat publik melalui diplomasi publik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kerja sama

dan stabilitas di seluruh dunia.

Pada bab selanjutnya, Reki Harianto memaparkan mengenai diplomasi publik yang dilakukan India ke Afganistan yang dilihat dari kacamata diplomasi publik modern. Melalui Twitter, diplomasi publik India di Afghanistan berkonsentrasi pada meningkatkan hubungan bilateral dan menciptakan citra yang positif. India menyebarkan informasi tentang bantuan kemanusiaan, proyek pembangunan, dan kerja sama budaya melalui akun resminya. Untuk menunjukkan bahwa India membantu kemajuan Afghanistan, sering dipromosikan inisiatif seperti beasiswa pendidikan, pelatihan profesional, dan dukungan infrastruktur. Selain itu, Twitter digunakan untuk menangani masalah terkini, menyebarkan pesan perdamaian, dan meningkatkan pemahaman budaya kedua negara. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan hubungan masyarakat dan meningkatkan pengaruh India di Afghanistan yang positif.

Agung Zulhatta menulis mengenai Wonderful Indonesia dan kaitannya dengan peningkatan jumlah wisatawan Australia ke Indonesia ditengah berbagai travel warning yang dikeluarkan oleh Australia mengingat gejolak isu keamanan di Indonesia. Wonderful Indonesia merupakan upaya promosi yang diprakarsai oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan mengekspos keindahan alam, budaya, dan keragaman destinasi wisata prioritas, seperti Bali, Yogyakarta, dan Raja Ampat, melalui berbagai media, termasuk iklan televisi dan media sosial hingga pelaksanaan festival kebudayaan Indonesia di Australia. Selain itu, acara promosi khusus dan kolaborasi dengan Australia juga meningkatkan jangkauan kampanye.

Fadhila Sudian, Anita Afriani Sinulingga, dan Diah Anggraini Austin menemukan bahwa sebagai salah satu perusahaan hiburan terbesar, SM Entertainment membantu diplomasi publik Korea Selatan ke Amerika Serikat dengan menyebarkan budaya pop. Dengan menggunakan idol group seperti EXO, NCT, dan Aespa, Korea Selatan memperkenalkan K-pop ke pasar internasional, termasuk Amerika Serikat, melalui konser, kolaborasi internasional, dan media sosial. Popularitas K-pop semakin meningkat seiring pelaksanaan event-event Kpop besar di berbagai kota Amerika, penampilan di TV, festival musik, serta munculnya K-pop di media besar Amerika seperti Billboard dan Vogue. Hasilnya, SM Entertainment tidak hanya meningkatkan citra Korea Selatan tetapi juga memperkuat hubungan

budaya dan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Habib Ali Zainal Abidin dan Wiwiek Rukmi Dwi Astuti membahas mengenai kanal YouTube Nihongo Mantappu sebagai bentuk diplomasi publik baru yang menyokong Jepang di Indonesia, melalui pengenalan bahasa dan budaya. Kanal ini, yang dikelola oleh Jerome Polin ini, berusaha mempromosikan bahasa Jepang dan elemen budaya Jepang melalui konten pendidikan dan hiburan. Video-video yang menarik tentang kehidupan di Jepang, tutorial bahasa, dan interaksi budaya menarik perhatian penonton Indonesia, terutama generasi muda. Nihongo Mantappu membantu orang Indonesia Jepang lebih memahami dan menghargai budaya Jepang, memperkuat hubungan bilateral, dan mendorong persahabatan antara Jepang dan Indonesia.

Pada dua topik tambahan buku ini, Rika Isnarti dan Maryam Jamilah memberikan pemaparan mereka mengenai Diplomasi Energi Indonesia dan Feminisme. Rika Isnarti berbicara tentang diplomasi energi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan energinya. Ini dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral, dan melibatkan Kementerian Luar Negeri sebagai fasilitator dan informan utama. Indonesia melaksanakan diplomasi energi secara multisektoral dengan melibatkan Kementerian luar negeri sebagai fasilitator dan informan utama. Di Indonesia, diplomasi energi dilakukan selain untuk mencapai kebutuhan energi nasional, tetapi juga untuk membangun hubungan internasional dengan memasukkan elemen energi ke dalam kerjasama internasional, meningkatkan hubungan internasional Indonesia.

Maryam Jamilah menjelaskan mengenai teori perdamaian Feminisme yang menyoroti peran perempuan dalam konflik dan perang. Teori Perdamaian Feminisme menekankan peran penting perempuan dalam konflik dan perang dengan menekankan perspektif gender dalam analisis perdamaian. Feminisme berpendapat bahwa perempuan memiliki kemampuan istimewa untuk mendorong perdamaian melalui cara-cara seperti empati, komunikasi, dan resolusi konflik non-kekerasan. Jika perempuan terlibat dalam proses perdamaian dan pengambilan keputusan, solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dapat dihasilkan. Namun, peran mereka sering terhambat oleh penindasan yang dialami, yang menurut varian feminisme berbeda dapat bersumber dari ketidaksetaraan politik, seksisme, androcentrisme, atau bahkan perempuan lain yang tidak

memahami perbedaan budaya dan kelas sosial. Selain itu, teori ini menekankan betapa pentingnya mengatasi kekerasan berbasis gender dan ketidaksetaraan gender untuk mencapai perdamaian yang sebenarnya.

Kami menyadari bahwa diplomasi publik adalah bidang yang terus berkembang dan dinamis. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya ditujukan bagi akademisi dan praktisi, tetapi juga bagi siapa saja yang memiliki minat untuk memahami dinamika hubungan internasional di era modern.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami menulis dan menerbitkan buku ini. Kami juga berterima kasih kepada para pembaca yang telah membacanya. Semoga kontribusi kami ini bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, Bandung, Padang  
Sofia Trisni





## DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
Diplomasi Publik ( <i>Sofia Trisni</i> )	1
Diplomasi Digital ( <i>Bima Jon Nanda</i> )	23
Diplomasi Kota ( <i>Inda Mustika Permata</i> )	43
Strategic Narrative ditengah Perkembangan Ekologi Media Baru dalam Kajian Hubungan Internasional ( <i>Eva Ermylina</i> )	63
Opini Publik dan Kebijakan Luar Negeri: Analisis Opini Publik dalam Perspektif Hubungan Internasional ( <i>Tia Mariatul Kibtiah</i> )	83
Tren Baru Diplomasi Publik : Penggunaan Media Sosial India terhadap Afganistan tahun 2001-2018 ( <i>Reki Harianto</i> )	115
Diplomasi Publik Indonesia melalui Kampanye Wonderful Indonesia dalam Meningkatkan Wisatawan dari Australia ( <i>Agung Zulhatta</i> )	137
Hallyu sebagai Instrumen Diplomasi Publik Korea Selatan ke Amerika Serikat ( <i>Fadhila Sudian, Anita Afriani Sinulingga, Diah Anggraini Austin</i> )	171
Diplomasi Publik Baru dalam Pengenalan Bahasa dan Budaya Jepang di Indonesia: Studi terhadap Kanal Youtube Nihongo Mantappu ( <i>Habib Ali Zainal Abidin &amp; Wiwiek Rukmi Dwi Astuti</i> )	193
Sebuah Tinjauan tentang Diplomasi Energi Indonesia ( <i>Rika Isnarti</i> )	221
Teori Perdamaian Feminisme: Peran Perempuan dalam Konflik dan Perang ( <i>Maryam Jamilah</i> )	241
Tentang Penulis	259



## DIPLOMASI KOTA

*Inda Mustika Permata*

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Andalas  
indamustikapermata@soc.unand.ac.id

### Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang terus meluas, perubahan dinamika politik, ekonomi, dan sosial telah memberikan ruang yang lebih besar bagi entitas non-negara untuk berpartisipasi aktif dalam dunia internasional. Di antara aktor-aktor non-negara tersebut, kota telah muncul sebagai pusat penting dalam membentuk dan memperkuat jaringan internasional. Demikian pula dalam kajian Hubungan Internasional, kota dianggap sebagai aktor non-negara (Charountaki, 2022). Pandangan ini muncul karena posisi kota itu yang tidak diakui sebagai negara, namun masih dapat berperan dalam hubungan internasional (Charountaki & Havlová, 2022; Herrschel & Newman, 2017). Aktivitas kota ini direfleksikan dalam upayanya untuk memperkuat posisinya di level internasional, seperti yang Charountaki dan Havlová (2022) rujuk dengan istilah *states-to-be*. Namun, meskipun kota terlibat aktif dalam dunia internasional, posisinya tersebut membuat ia sama dengan aktor non-negara lainnya. Keterlibatan kota dan dinamika dunia yang bergerak dinamis, kemudian membuat kota berkembang menjadi pusat inovasi, perdagangan, dan kegiatan budaya yang tidak hanya mempengaruhi wilayahnya sendiri, tetapi juga memiliki dampak global yang signifikan.

Seiring dengan peran negara dalam diplomasi tradisional, kota-kota besar seperti New York, London, Tokyo telah muncul sebagai aktor utama dalam membentuk jaringan hubungan internasional yang kuat. Mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bersifat internasional, menjalin perjanjian kerja sama dengan kota-kota lain di berbagai belahan dunia, serta berkolaborasi dalam berbagai isu seperti perdagangan, investasi, lingkungan, dan budaya. Fenomena seperti di atas, menciptakan ruang bagi konsep diplomasi kota, yang pada awalnya mungkin terdengar tidak lazim, kini telah menjadi

elemen integral dalam lingkup hubungan internasional. Di samping itu, perkembangan diplomasi kota secara konseptual juga implikasi dari adanya perkembangan praktik diplomasi publik yang pesat dalam dunia internasional hari ini. Fenomena ini memungkinkan kota untuk menjadi salah satu aktor yang dapat mempraktikkan diplomasi publik (Sohaela & Grandi, 2021). Hal serupa juga dijelaskan oleh La Porte (2013) bahwa dalam aktivitas internasional, kota sering kali mempersuasi dalam mempromosikan kepentingannya di level internasional, khususnya menggunakan soft power sebagai alat untuk mempengaruhi. Lebih lanjut, La Porte mengkategorikan aktivitas kota ini lebih khusus dalam ranah diplomasi publik baru (*new public diplomacy*). Berdasarkan penjelasan para ahli ini, maka dapat diidentifikasi bahwa diplomasi publik dan diplomasi kota memiliki hubungan erat yang signifikan. Dengan menggunakan istilah diplomasi kota, secara spesifik kota menjadi aktor yang disorot di antara sekian banyaknya aktor non-negara yang terlibat pada aktivitas internasional.

Pentingnya diplomasi kota dapat dilihat dari beragam inisiatif yang diambil oleh pemerintah kota untuk memperkuat posisi mereka dalam arena internasional. Program pertukaran budaya, pendidikan, dan ekonomi antar kota telah menjadi instrumen penting dalam membangun jembatan antarbangsa (Amiri, 2022; Cremer et al., 2001). Melalui forum-forum seperti konferensi internasional kota, pertemuan antar kota, dan kerja sama bilateral, kota-kota tidak hanya memperluas jaringan mereka tetapi juga saling bertukar budaya dan pengalaman bersama. Namun, dalam konteks diplomasi kota, tantangan juga muncul. Ada ketegangan antara aspirasi global kota dengan kebijakan nasional negara yang mungkin bertentangan. Misalnya, ketika kota ingin memperluas hubungan ekonomi dengan kota asing, tetapi kebijakan proteksionis dari pemerintah pusat dapat menjadi penghambat. Selain itu, ada juga masalah yang berkaitan dengan ketidaksetaraan antar kota dalam skala global. Beberapa kota besar mungkin lebih mampu dalam melaksanakan diplomasi kota dibandingkan dengan kota-kota kecil atau sedang dalam konteks pembangunan. Terlepas dari itu semua, fenomena ini menandakan bahwa kota menjadi bagian dalam dinamika hubungan internasional saat ini. Hal ini kemudian mendorong kota untuk mempunyai kapabilitas dalam melakukan diplomasi agar kota mampu tetap eksis dalam panggung global.

Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan diplomasi kota dari perspektif akademis. Secara spesifik, tulisan ini

menggali konsep diplomasi kota dan relevansinya dalam konteks kajian Hubungan Internasional. Ini termasuk eksplorasi tentang aktor kota dalam sistem internasional, kemudian perkembangan konsep diplomasi kota secara konseptual, dan juga contoh praktik diplomasi kota.

### **Kota dalam sistem internasional**

Dalam studi Hubungan Internasional, telah lama diyakini bahwa aktor negara adalah aktor yang dominan dalam sistem internasional. Hal ini tentu berimplikasi pada porsi peranan aktor lainnya, termasuk kota, dalam dinamika dunia internasional. Seperti yang diungkapkan oleh Alger (2014) bahwa kota terlihat sebagai aktor yang marjinal dan remeh, bila kita berbicara dari segi aktivitas militer dan anggarannya yang biasa dilakukan oleh pemerintah nasional. Hal serupa juga diungkapkan oleh beberapa ahli bahwa kota sebagai aktor sering dipinggirkan dan dilihat sebagai unit paling bawah dan bukan sebagai aktor internasional (Acuto, 2013; Curtis, 2014; Marchetti, 2021). Namun, menurut Alger (2014), apabila kita melihat dari sudut pandang lain seperti populasi dunia, seiring waktu akan terpusat di kota-kota, tentu situasi ini menjadikan kota sebagai topik pembahasan yang penting secara keilmuan. Alger juga menambahkan bahwa fenomena ini mendorong kota untuk terlibat dalam aktivitas internasional. Menariknya, berdasarkan hal ini, Alger melihat hubungan internasional dari sudut lain yaitu sebagai suatu relasi yang terjadi antar kota. Tentu pandangan Alger ini menunjukkan bahwa kota menjadi area yang menjanjikan untuk dieksplor lebih lanjut.

Pandangan Alger masih logis, bila kita sandingkan dengan fenomena banyaknya kota-kota yang saat ini secara aktif berpengaruh secara politik, ekonomi, maupun budaya. Kota tersebut diistilahkan sebagai kota global (*global city*) oleh Sassen (2000). Menurut Sassen, kota global adalah kota yang strategis secara ekonomi dalam sistem internasional yang secara signifikan mempengaruhi dinamika kota tersebut. Selain itu, Curtis dalam karyanya (2011) berupaya membawa topik kota global pada studi Hubungan Internasional. Sama halnya dengan Sassen, Curtis juga menjelaskan bahwa kehadiran kota global ini adalah implikasi aktivitas ekonomi transnasional yang kota terlibat di dalamnya serta adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal aktivitas ekonomi yang Curtis maksud adalah tentang bagaimana kota mampu menjalankan fungsinya sebagai pendukung

utama dan penyedia infrastruktur dalam hal pusat perintah dan kontrol (*command-and-control*) pada sistem ekonomi global. Pendapat Sassen dan Curtis ini merefleksikan bahwa kota menjadi simpul (*node*) dalam jaringan ekonomi global. Berdasarkan penjelasan Sassen dan Curtis ini, maka dapat dimaknai bahwa kota memiliki kemampuan untuk menarik perusahaan global agar berinvestasi di kotanya, menyerap para pekerja asing yang memiliki keterampilan, menarik para turis internasional untuk datang ke kotanya, dan memfasilitasi sirkulasi ide yang beragam di dalamnya. Peran kota sebagai simpul ini, menurut Henderson (2017), berimplikasi pada karakteristik kota yang menjadi kaya akan keberagaman budaya dan sosial juga industri seni dan kreatifnya yang berkembang pesat.

Kita bisa ambil salah satu kota di Asia sebagai contoh yaitu Tokyo, ibukota negara Jepang. Kota ini secara signifikan berpengaruh karena karakteristik sosio-ekonominya dan implementasi kebijakannya yang efektif (Ursic & Imai, 2020b). Tokyo berkembang menjadi kota yang kompetitif dalam artian mampu untuk menarik investasi dan orang-orang yang memiliki keahlian dari adanya aktivitas global ke dalam kotanya. Dengan perkembangan seperti ini, Tokyo sebagai salah satu kota yang berhasil menjadi kota global seperti istilah Sassen sebelumnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa Tokyo berhasil menjadi kota global, karena kota tersebut telah menjadi ibukota berabad-abad lamanya, sehingga secara otomatis berimplikasi pada perkembangan pengaruh dan pengalaman Tokyo sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya (Hill & Kim, 2000; Song, 2020; Ursic & Imai, 2020b). Maka tidak heran, posisi kota seperti Tokyo dapat mampu bersaing dengan kota-kota dari negara barat, seperti New York, London, Paris, dll. Dalam konteks ini, Tokyo mampu menciptakan keterhubungan kotanya lewat transportasi dan komunikasi (Henderson, 2017). Daya tarik Tokyo dalam jaringan ekonomi global menempatkan Tokyo sebagai kota dengan peringkat alpha+ pada tahun 2020 (GaWC, 2020). Peringkat ini menunjukkan seberapa potensial suatu kota dalam sistem ekonomi global, dengan alpha++ sebagai peringkat tertinggi dan gamma- sebagai peringkat paling rendah. Posisi Tokyo sebagai salah satu kota alpha+ dilihat dari banyaknya perusahaan asing yang berkantor dan beroperasi di wilayah tersebut, karena dianggap strategis secara geografis. Terbukti dari data yang disediakan oleh Tokyo Metropolitan Government (TMG) bahwa markas perusahaan asing terkonsentrasi sebanyak 75.3 persen di Tokyo (TMG, 2023). Jumlah persentase ini juga mengindikasikan interaksi antar-budaya

yang terjadi di dalam kota Tokyo juga berkembang signifikan, karena adanya pekerja asing yang masuk. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Pooch (2016) bahwa kota global menjadi suatu zona kontak untuk pertemuan dan pertukaran beragam budaya.

Interaksi budaya juga terjadi karena adanya turis asing yang berkunjung ke kota global tersebut. Tingginya turis yang datang ke Tokyo terlihat dari data yang dipublikasikan oleh Japan National Tourism Organization (2023), misalnya pada tahun 2019 persentase kedatangan turis asing ke Tokyo dibanding wilayah lain di Jepang adalah 47.2 persen dan meningkat hingga 52.9 persen pada tahun 2023. Tingginya intensitas individu yang datang disebabkan karena Tokyo mampu menyediakan ruang untuk bersantai (*leisure*), ruang hijau (*greenery*), dan budaya (Ursic & Imai, 2020a), sehingga dapat memenuhi beragam keinginan turis yang berkunjung. Interaksi budaya yang terjadi juga menciptakan antusiasme pegiat seni dalam menghidupkan industri seni dan kreatif di Tokyo. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan urban dari pemerintah kota, misalnya dengan aktifnya mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi sumber pusat kebudayaan di Tokyo, seperti Ueno yang menjadi pusat sejarah dan museum budaya Jepang; kemudian Yanesen yang menjadi tempat populer bagi turis asing yang menyajikan nuansa kota tua Jepang dan kuil; Akihabara sebagai tempat populer untuk barang elektronik dan pusat budaya populer Jepang seperti *manga*, *anime*, dan *game*; dan beberapa tempat lainnya (Tamari, 2017). Adanya aktivitas tersebut di atas mendorong Tokyo tumbuh menjadi kota yang berpengaruh dari segi ekonomi maupun dari segi budayanya.

Meskipun, Tokyo berhasil menjadi kota global dengan peringkat atas, dalam sistem internasional tidak semua kota dapat menjadi kota global (Sassen & Lynd, 2010). Sebab, hal ini ditentukan oleh performa kota tersebut dalam menyerap manfaat dari dinamika arus global berdasarkan dari nilai-nilai lokal dan karakter kota tersebut (Anttiroiko, 2015). Merespon hal ini, ditengah kompetisi antar kota yang terjadi di level global, kota perlu meningkatkan soft power-nya agar dapat bersaing (Tamotsu, 2002). Investasi sumber daya dalam soft power menjadi penentu eksistensi dan daya saing kota kecil dan menengah. Kota kecil dan menengah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kota yang peringkatnya berada di bawah peringkat alpha, seperti beta dan gamma. Dengan kata lain, seberapa kompetitifnya kota tersebut bisa terlibat dalam aktivitas ekonomi global. Pemaknaan ini juga didasarkan pada argumen Kresl dan Ietri (2016) bahwa

kompetitif suatu kota tidak ditentukan dari ukuran kota tersebut. Sayangnya, acap kali kota yang berada pada peringkat di bawah kota global cenderung lemah dalam hal eksistensinya di level global dan keaktifan di pentas global (Cullis et al., 2023; Sevin, 2021). Faktor internal seperti kurangnya pengetahuan, niat pemerintah, dan sumber daya manusia dalam melaksanakan manajemen hubungan luar negeri menjadi hambatan sendiri bagi kota-kota kecil seperti yang dipaparkan oleh Isnarti dan Trisni (2020) dalam karyanya. Maka pertanyaan muncul, apa peranan yang bisa dimainkan oleh kota kecil dan menengah di dalam sistem? Bila pertanyaan ini disandingkan dengan perkembangan kota global, tentulah kota kecil dan menengah memiliki peranan dengan porsi yang amat minim di tengah intensnya kompetisi antar kota.

Namun, menurut Kresl dan Ietri (2016), kota dengan peringkat di bawah kota global masih bisa tetap kompetitif dengan memanfaatkan daya tarik yang melekat dalam kotanya. Adapun Kresl dan Ietri menyebutkan daya tarik tersebut seperti kualitas hidup dan hubungan sosial yang ditawarkan, keindahan pemandangan, dan ruang publik yang nyaman (*livability*). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lorentzen dan van Heur (2012) bahwa kota-kota tersebut cenderung terlihat menarik bagi keluarga, seniman, dan orang-orang tua. Pendapat Lorentzen dan van Heur ini juga sejalan dengan pandangan Sevin (2021) bahwa segmentasi dari target kota-kota tersebut sangatlah terbatas sehingga berimplikasi pada reputasi dan representasi mereka yang lemah. Maka dari itu, Lorentzen dan van Heur memberi catatan bahwa sumber daya budaya (*cultural*) dan alam (*natural*) yang mereka kaitkan dengan kegiatan seperti pariwisata, budaya, festival makanan, dan juga pendidikan dapat menjadi bagian dari cara kota tersebut untuk menaikkan eksistensi dan peranannya dalam pentas global. Hal ini bisa dilihat dari kasus Seoul, ibukota Korea Selatan.

Berbeda dengan Tokyo, Seoul dahulunya adalah kota yang berada pada peringkat beta (Beaverstock et al., 1999). Meskipun posisinya saat ini masih berada di bawah peringkat kota Tokyo, saat ini Seoul sudah berada pada posisi kota alpha- (GaWC, 2020). Seoul saat ini telah bertransformasi menjadi salah satu pusat budaya dan ekonomi di dunia internasional (Joo, 2023; Yun, 2017). Eksistensi Seoul dalam hubungan internasional juga dapat dilihat dari aktifnya kota ini dalam mempromosikan dirinya sebagai aktor yang relevan dan setara dengan aktor kota lainnya yang dianggap maju. Contoh yang dapat dilihat adalah perilaku adaptif Seoul sebagai kota yang mengikuti



perkembangan dunia terkini. Misalnya, Seoul menerapkan kebijakan-kebijakan yang sedang tren seperti konsep kota pintar (*smart city*) (Lee et al., 2014) dan *sharing city* (Robinson & Ji, 2022). Keberhasilan Seoul ini menunjukkan bahwa dalam sistem internasional, kota bukanlah aktor yang statis, tapi dinamis. Kota bisa menjadi aktor yang kuat pengaruhnya dalam hubungan internasional, bila dibarengi dengan strategi yang tepat dan adaptif, agar dapat memaksimalkan daya saingnya agar bertahan dalam kompetisi yang intens. Strategi ini misalnya adalah diplomasi kota. Maka dari itu, bagian berikutnya akan membahas mengenai diplomasi kota dan perkembangan konseptualnya dalam studi Hubungan Internasional.

### **Perkembangan Diplomasi Kota Secara Konseptual**

Aktivitas kota dalam dunia internasional, sebenarnya bukanlah hal yang baru. Berkenaan dengan ini, Grandi (2020) menjelaskan bahwa institusi politik tertua, yakni polis yang berarti kota, telah mempengaruhi hubungan internasional selama ribuan tahun. Sependapat dengan Grandi, Surmacz (2018) juga menyatakan bahwa fenomena ini telah lama ada. Leffel (2021) menjelaskan bahwa kota berpengalaman sebagai simpul untuk waktu yang cukup lama yang terlihat dalam beberapa aktivitas penting di dalamnya seperti budaya, ekonomi, dan sosial. Leffel melanjutkan bahwa kegiatan ini menjadikan kota sebagai wadah untuk bertemunya beragam budaya, ide, dan inovasi sehingga menjadikan kota lebih hidup dan dinamis. Menurut Leffel, karakteristik kota seperti ini yang menjadikan kota sebagai aktor yang dapat menyediakan kondisi yang kondusif dalam keikutsertaannya dalam aktivitas yang bersifat global, seperti diplomasi. Maka dari itu, keikutsertaan kota dalam urusan global menjadi krusial, karena bertujuan untuk meningkatkan citra dan standar hidup kota, serta memperkuat posisi politiknya.

Dalam konteks ini, diplomasi kota merujuk pada suatu proses dimana kota berinteraksi dengan para aktor di panggung politik internasional untuk mewakili diri mereka sendiri dan kepentingan mereka (van der Pluijm & Melissen, 2007). Selanjutnya, Marchetti (2021) mendefinisikan diplomasi kota sebagai tindakan terlibat dalam hubungan dengan pihak ketiga di luar batas wilayahnya dengan tujuan untuk mencapai tujuan kota tersebut. Selain itu, Surmacz (2018) mendefinisikan diplomasi kota sebagai proses representasi dan komunikasi dengan tujuan kota membangun dan memperkuat

hubungan, mengejar kepentingan sendiri, berupaya mempengaruhi perilaku aktor internasional (negara, lembaga internasional, kota lain, dan aktor non-negara), dan mencari peluang untuk pemecahan masalah internasional. Tampak bahwa kota telah muncul sebagai aktor yang berpartisipasi dengan motif politik di dalam hubungan internasional. Menanggapi aktivitas kota dalam diplomasi, Leffel (2021) mengamati bahwa aktivitas diplomasi kota telah mengalami pergeseran yang signifikan. Grandi (2020) pun berpendapat diplomasi kota era modern saat ini adalah hasil dari tren evolusi ganda dari hubungan internasional dan manajemen kota. Ini mungkin terjadi, karena kota memiliki posisi di antara (*in-between of power*), seperti yang dikemukakan oleh Sevin dan Amiri (2023). Otoritas mereka berasal dari posisi mereka dalam pemerintahan, dan mereka juga sah karena mereka terkait dengan orang-orang yang mereka layani.

Lebih rinci, Leffel (2021) menggambarkan bahwa dalam fenomena diplomasi kota modern ini, pemerintah kota ikut ambil bagian dalam arena kebijakan luar negeri yang secara tradisional didominasi oleh pemerintah negara. Leffel menyoroti beberapa faktor yang mendorong fenomena ini terjadi seperti keharusan kota untuk menerapkan norma-norma yang bersifat universal, saat pemerintah negara gagal untuk melakukannya. Faktor lainnya adalah efek dari perkembangan rezim demokrasi itu sendiri yang memungkinkan kota untuk bisa leluasa dalam menjalankan aktivitas politiknya, termasuk di ranah global. Di samping itu, berkembangnya praktik tata kelola global dalam konteks urban (*global urban governance*) memberikan kota ruang untuk menyampaikan aspirasinya berkenaan isu-isu yang sedang tren di level global (Acuto et al., 2021). Dengan kata lain, isu-isu yang bersifat global ini memberikan dampak langsung ke kota sebagai pusat berkegiatannya masyarakat, begitu sebaliknya. Faktor-faktor ini kemudian menjadi momentum bagi kota untuk hadir dan eksis dalam panggung global. Di sisi lain, dari aspek teoritis, ini menandai bahwa adanya perkembangan perilaku kota sebagai unit analisis dalam Hubungan Internasional.

Pada perkembangannya, aktivitas kota dalam diplomasi juga sering dibahas dengan penggunaan istilah yang lain seperti paradiplomasi dan juga diplomasi urban. Secara umum, kedua istilah ini mirip dengan diplomasi kota yang menunjukkan adanya eksistensi kota dalam hubungan internasional. Perbedaannya adalah dalam konteks porsi peranan kota dan juga relasinya dengan negara. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Criekekemans (Criekekemans, 2018) tentang

paradiplomasi. Crikemans mengutip penjelasan Aldecoa & Keating, (1999) mengenai definisi paradiplomasi yaitu aktivitas politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Crikemans juga menyoroti kritik yang diberikan para ahli terhadap penggunaan kata “para” yang dalam konteks ini maksudnya adalah paralel. Kritik ini misalnya, istilah paradiplomasi seolah memberi gambaran adanya pemisahan baik itu aktivitas diplomasi negara dan sub-negara. Padahal, menurut Crikemans dalam beberapa kasus, aktor negara dan sub-negara bersama-sama melakukan upaya diplomasi sebagai bentuk cara penggabungan kekuatan diplomatik di level internasional. Dalam kata lain, aktivitas diplomasi dilakukan berdampingan dengan diplomasi negara (Chaloux & Paquin, 2013). Di samping itu, istilah paradiplomasi juga tidak terbatas pada penjelasan perilaku aktor kota saja, tetapi juga bisa lebih luas (Fantoni & Avellaneda, 2022; Kuznetsov, 2015).

Sementara, istilah diplomasi urban juga membahas aktivitas kota, namun menyoroti aktivitas dan dinamika di dalam konteks ruang (*spaces*). Dalam kata lain, aktivitasnya digambarkan dalam sudut pandang geografi. Seperti yang dijelaskan oleh Manfredi-Sánchez (Manfredi-Sánchez, 2023) dalam karyanya, ia menjelaskan bahwa diplomasi urban adalah suatu upaya untuk merespon implikasi isu global di level urban atau perkotaan berdasarkan situasi dan tuntutan dari masyarakat, sehingga secara alamiah diplomasi urban bersifat publik. Lebih lanjut Manfredi-Sánchez (2023) menjelaskan bahwa konteks diplomasi urban lebih lokal, yang artinya pelaksanaannya bersifat lokal dan spesifik di ranah urban tersebut. Penjelasan dari Manfredi-Sánchez menunjukkan bahwa diplomasi urban menekankan pada dinamika masyarakat di dalam kota tersebut dalam merespon isu-isu yang bersifat global. Oleh sebab itu, penggunaan diplomasi urban dipandang sebagai aplikasi diplomasi di ranah yang lebih sempit dan terbatas. Di samping itu, penjelasan para ahli tentang paradiplomasi, dapat dipahami bahwa istilah ini belum bisa menggambarkan secara utuh bagaimana perilaku kota sebagai aktor dalam aktivitas dunia hari ini. Maka demikian, penggunaan diplomasi kota dianggap lebih sesuai dengan perkembangan tren hari ini. Sebab, lebih fokus menjelaskan bagaimana kota secara global dapat terlibat dan terkoneksi dengan aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah yang berada di luar teritorial negaranya (Acuto et al., 2018).

Sebagaimana diuraikan dalam argumen para ahli tersebut, diplomasi kota dapat dilihat sebagai suatu proses kota berkomunikasi dengan aktor lain dari luar batas wilayah teritorialnya untuk tujuan

meningkatkan visibilitas kota tersebut dan mengambil bagian dalam inisiatif internasional. Dalam praktiknya, walikota menjadi aktor sentral dalam pelaksanaan diplomasi kota (Asdourian & Ingenhoff, 2020). Keterlibatan walikota juga disorot oleh Klaus (2022) dalam karyanya. Klaus berpendapat bahwa walikota mendapat kewenangan berbicara atas nama kota, karena mereka dipilih atau ditunjuk secara sah. Di samping itu, Klaus juga menekankan dalam praktiknya, walikota menjalankan diplomasi kota murni untuk mendapatkan strategi ataupun langkah tepat dalam merespon suatu isu untuk kotanya, bukan untuk menantang pemerintah nasional. Maka tidak heran, isu yang sering dibahas adalah isu-isu politik tingkat rendah (*low politics*) seperti HAM dan lingkungan (Ljungkvist, 2014), kemudian kesehatan (Acuto et al., 2017), meskipun isu keamanan juga kadang masuk ke dalam perhatian kota seperti terorisme dan kejahatan transnasional (Ljungkvist, 2019; Sampaio, 2016). Oleh sebab itu, diplomasi kota dapat juga berfungsi untuk membuka saluran (*channel*) lain ketika suatu permasalahan yang terjadi di kota dan belum dapat diselesaikan oleh pemerintah kota.

Untuk mengaplikasikan diplomasi kota, Grandi (2020) menyatakan bahwa kota-kota dapat mengambil manfaat dari serangkaian alat yang dapat memfasilitasi partisipasi mereka dalam hubungan internasional, termasuk (1) perjanjian bilateral, yang dapat dibentuk sebagai perjanjian kota kembar, perjanjian kerja sama (atau persahabatan), dll.; (2) jaringan kota, di mana kegiatan ini terdiri dari kerja sama multilateral yang diformalisasikan antara tiga atau lebih kota yang bekerjasama dalam sektor aksi munisipal tertentu, seperti jaringan kota tematik atau jaringan serba guna (*multi-purpose*); (3) proyek-proyek bilateral dan multilateral, yang biasanya memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu; (4) acara (*event*) yang bersifat internasional; (5) advokasi internasional melalui kampanye. Meskipun demikian, tidak semua bentuk praktik diplomasi kota ini harus dilakukan oleh kota. Kota dapat memilih aktivitasnya yang relevan dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam praktiknya, kota bisa mengkombinasikan praktik-praktik tersebut sehingga bisa maksimal dalam meningkatkan pengaruh dan visibilitasnya dalam panggung global.

## Praktik Diplomasi Kota Hong Kong

Hong Kong adalah bagian dari Tiongkok yang menikmati keistimewaan sehingga nama resmi dari wilayah ini adalah Hong Kong SAR (*Special Administrative Region*). Hong Kong kembali ke pangkuan Tiongkok setelah diserahkan oleh Pemerintah Inggris pada tahun 1997. Sejak saat itu, Hong Kong mempraktikkan prinsip *one country, two system*. Prinsip ini menekankan bahwa Hong Kong adalah bagian sah dari Pemerintah Tiongkok dan diberikan otonomi khusus dalam menjalankan pemerintahannya. Meskipun demikian, Hong Kong juga diberikan batasan tentang aktivitas hubungan eksternal apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan secara mandiri, seperti bidang ekonomi, perdagangan, moneter dan keuangan, pengiriman, komunikasi, pariwisata, budaya, dan olah raga seperti yang tertuang dalam pasal 151 tentang hubungan eksternal (Constitutional and Mainland Affairs Bureau, n.d.). Walaupun Tiongkok memberikan batasan, pasal ini masih memungkinkan Hong Kong untuk menjalankan aktivitas luar negerinya sehingga bisa tetap eksis dalam hubungan internasional.

Dalam sistem internasional, Hong Kong merupakan salah satu kota alpha+ merujuk indeks yang dikeluarkan oleh GaWC (2020). Peringkat ini mengindikasikan bahwa Hong Kong adalah kota penting sebagai simpul dalam jaringan ekonomi global. Peringkat ini juga tergambar dalam citra Hong Kong di dunia internasional sebagai pusat finansial dunia (Lin, 2008). Hong Kong juga dianggap sebagai salah satu kota yang mengendalikan bursa modal global (D. R. Meyer, 2002). Jadi, meskipun dari segi ukuran kota, Hong Kong memang kecil, namun dia mengambil posisi penting sebagai pusat ekonomi global. Posisi Hong Kong ini menurut Meyer (2002), karena banyaknya perusahaan perbankan internasional kelas dunia yang berasal dari Eropa Barat, Amerika Utara, dan Asia yang memilih Hong Kong sebagai basis operasional mereka sejak awal, sehingga ini menarik perusahaan-perusahaan internasional lainnya berkantor di kota. Dengan kata lain, Hong Kong adalah kota yang kompetitif karena mampu mengambil keuntungan dari pergerakan modal global.

Disamping itu, Hong Kong juga mampu memancarkan daya tariknya dari aspek lain, yaitu budaya. Sebagai salah satu kota Tiongkok, Hong Kong menjadi tempat perpaduan budaya, karena faktor sejarahnya yang dahulu pernah dikelola oleh Pemerintah Inggris. Hal ini tentu menjadi nilai tambah Hong Kong untuk bersaing dan menjadi salah

satu magnet yang menarik pergerakan orang dari berbagai wilayah untuk masuk ke Hong Kong. Situasi ini menjadikan Hong Kong sebagai tempat yang dinamis, karena banyaknya beragam budaya yang masuk dan hadir di kota tersebut. Hal ini membuat Hong Kong terhubung dengan belahan dunia lain, sehingga Hong Kong menjadi *polyglot city* (Wang, 2020). Seperti yang dijelaskan oleh Chiu dan Siu (2022), meskipun populasi di Hong Kong adalah mayoritas orang Tionghoa, namun masyarakat lokal juga menyambut budaya barat. Berkaitan dengan ini, Chiu dan Siu berpendapat bahwa Hong Kong memiliki daya tawar sebagai kota yang berpengaruh secara global dan berperan signifikan sebagai jembatan dalam menghubungkan Tiongkok dan negara barat seperti Eropa. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Tiongkok terhadap Hong Kong sebagai gerbang Tiongkok menyerap modal global (D. Meyer & Lee, 2024).

Kayanya budaya yang hadir juga memperkuat industri film lokal yang ada di Hong Kong sehingga diminati oleh penonton yang berasal dari negara lain. Film-film produksi Hong Kong laris-manis, terbukti banyaknya selebriti Hong Kong yang mendunia seperti Jackie Chan, Bruce Lee, Andy Lau, Chow Yun-Fat, dan masih banyak lagi. Industri film Hong Kong sering disebut oleh ahli sebagai Industri Hollywood Asia (Chiu & Siu, 2022). Namun, kejayaan industri film Hong Kong tidak lah lama. Tahun 2000an awal industri ini meredup, bahkan menurut (Wang, 2020), sejak pertengahan tahun 1990an telah mengalami kemunduran dilihat dari kuantitas jumlah dan nilai ekspor dari industri ini ke luar negeri. Chiu dan Siu (2022) menjelaskan alasannya karena film produksi lokal kalah bersaing dengan film-film asing yang masuk. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah berusaha untuk melakukan upaya untuk mendorong agar industri film Hong Kong kembali dinamis. Dengan mengusung semangat *East-meet-West*, pemerintah berupaya untuk mempromosikan budaya populer (*pop-culture*), seperti industri filmnya secara global (GovHK, 2022).

Dalam praktiknya pemerintah mendorong terlaksananya kolaborasi proyek-proyek antara pembuat film yang berasal dari Hong Kong dan produser asal negara Asia dan atau Eropa (Hong Kong Film Development Council, 2024). Proyek ini diinisiasi oleh pemerintah dengan memberikan dana bantuan pembuatan proyek film sebesar HK\$9 Juta (Hong Kong Film Development Council, 2024). Lebih lanjut, dalam ketentuan proyek ini, pemerintah tidak memberikan syarat yang ketat, seperti adegan tidak harus di ambil di Hong Kong, serta tidak harus menggunakan bahasa Inggris atau Mandarin. Inisiatif

pemerintah ini mendorong para seniman film untuk mengembangkan jejaringnya secara global serta di saat yang sama juga membuka peluang untuk dapat masuk ke pasar film di negara lain, serta mengeksplorasi cerita selain di sekitar Hong Kong (Shackleton, 2021). Inisiatif ini menyiratkan upaya pemerintah untuk memberi jalan keluar untuk menggiatkan kembali situasi industri film yang lesu dan ketergantungan industri tersebut kepada pasar Tiongkok. Sebab, adanya regulasi mengenai batasan film yang mengangkat cerita yang bermuatan politik, mempersulit langkah produser dalam mengembangkan film Hong Kong.

Di samping itu, praktik kolaborasi juga sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi industri film Hong Kong. Beberapa ahli mengistilahkan fenomena ini dengan konsep *pan-Asian cinema*, untuk menggambarkan adanya fenomena *talent sharing*, investasi lintas batas, produksi bersama dan konsolidasi pasar (Wang, 2020; Yeh & Davis, 2002). Dalam praktiknya, menurut Wang (2020), melalui konsep ini, Hong Kong dapat memainkan perannya, karena secara historis dan posisinya strategis. Di samping itu, Wang (2020) juga menunjukkan bahwa film yang diproduksi dengan mengaplikasikan konsep ini laris-manis di pasaran, seperti film dari rumah produksi *Applause Pictures* yang didirikan oleh Peter Chan Ho-Sun. Praktik dari konsep ini dapat menguntungkan secara finansial, penggunaan sumber daya, serta memperluas pasar, karena biasanya cerita yang diangkat memiliki kesamaan latar dengan negara yang berkolaborasi. Maka, berdasarkan kesuksesan ini, tidak heran mengapa pemerintah menginisiasi upaya ini. Selain itu, seperti lazimnya praktik industri budaya populer lainnya, pemerintah biasanya berperan dalam memberikan bantuan dana untuk memperlancar aktivitas dari industri ini.

Penyelenggaraan kegiatan yang bersifat global juga diupayakan untuk memperluas eksposur dari industri film Hongkong, seperti Hong Kong Internasional Film Festival (HKIFF). Kegiatan festival film ini adalah salah satu yang tertua di Asia. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 1976. Pada tahun 2024 ini, kegiatan festival ini diselenggarakan pada akhir Maret hingga awal April, dengan menghadirkan para seniman dan pecinta film dari seluruh dunia. Dengan terselenggaranya kegiatan ini di Hong Kong, tentu akan menarik banyak orang asing ke Hong Kong dan meningkatkan visibilitas Hong Kong secara global. Pemerintah juga mempromosikan kegiatan ini dalam pertemuan yang sifatnya resmi seperti Hong Kong International Cultural Summit yang dihadiri lebih dari 700 orang yang berasal dari berbagai kawasan seperti Asia-

Pasifik, Timur-Tengah, Eropa, dan Amerika (GovHK, 2024). Pertemuan ini diadakan untuk memperdalam pemahaman dalam pertukaran budaya antar peserta demi mendukung tujuan Hong Kong menjadi salah satu pusat budaya (*cultural hub*) dunia.

## **Kesimpulan**

Di tengah dominannya aktor negara dalam hubungan internasional, tulisan ini berkontribusi untuk menambah literatur mengenai aktor kota. Implikasi dari menonjolnya narasi negara dalam kajian Hubungan Internasional adalah jaranganya pembahasan mengenai aktor kota. Dengan adanya globalisasi dan kecanggihan teknologi, aktor kota muncul sebagai aktor yang dinamis dalam sistem internasional. Peran kota sebagai simpul-simpul penting mulai terlihat dan menjadi signifikan dengan terbentuknya jaringan ekonomi global. Kota yang berhasil dalam hal ini sering kali disebut sebagai kota global, sehingga kota tersebut haruslah kompetitif sehingga dapat menjadi pusat ekonomi maupun budaya. Untuk mencapai hal ini, maka kota haruslah membekali diri mereka dengan kemampuan diplomasi kota. Aktivitas diplomasi kota ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas mereka di dunia internasional sehingga menekankan proses komunikasi dan representasi kota yang lebih menarik. Meskipun banyak istilah yang muncul untuk menggambarkan strategi kota dalam panggung global, istilah diplomasi kota menjadi relevan karena berusaha menjelaskan perilaku kota sebagai suatu unit lewat berbagai macam aktivitas. Tulisan ini mengambil contoh praktik diplomasi kota Hong Kong dalam mempromosikan industri filmnya. Hong Kong yang sudah menjadi kota alpha+ tentulah sudah memiliki citra yang kuat di dunia internasional. Namun, kuatnya persaingan antar kota, mendorong kota untuk terus aktif berdinamika agar posisinya dalam sistem dapat dipertahankan dan dinilai kompetitif. Dalam kasus Hong Kong, penguatan industri film tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat pengaruhnya lewat soft power. Hong Kong menyadari bahwa mereka memiliki sumber daya yang kuat dari segi budaya yang dapat menjadi sumber atraksi kotanya. Dalam contoh kasus ini, diplomasi kota yang dilakukan oleh Hong Kong berkaitan dengan diselenggarakannya kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional yang ditandai dengan adanya audiens dan pelaksanaan di level internasional. Selain itu, kasus Hong Kong juga memperlihatkan bahwa meskipun telah menjadi kota global, Hong



Kong juga menghadapi tantangan tidak hanya dari adanya dominasi Hollywood, namun juga meningkatnya industri film produksi dari negara Asia lainnya. Maka dari itu, peran Pemerintah Hong Kong dalam hal ini sangatlah signifikan.

### **Pertanyaan Diskusi**

1. Dalam sistem internasional yang kompleks, apa peran utama yang bisa dimainkan oleh kota sehingga peran tersebut berbeda dari aktor non-negara lainnya?
2. Bagaimana diplomasi kota dalam konteks fenomena dan konseptual dapat mencerminkan evolusi dari kajian narasi Hubungan Internasional yang didominasi oleh negara?
3. Bagaimana kota peringkat beta dan gamma dapat menggunakan diplomasi kota untuk memperkuat reputasi dan posisi mereka dalam jaringan global?

### **Daftar Pustaka**

- Acuto, M. (2013). Introduction: spotting the “gorillas in our midst.” In *Global Cities, Governance and Diplomacy: The Urban Link*. Routledge.
- Acuto, M., Decramer, H., Kerr, J., Klaus, I., Tabory, S., & Toly, N. (2018). *Toward City Diplomacy: Assessing capacity in select global cities*. [https://globalaffairs.org/sites/default/files/2022-05/toward\\_city\\_diplomacy\\_report\\_180207.pdf](https://globalaffairs.org/sites/default/files/2022-05/toward_city_diplomacy_report_180207.pdf)
- Acuto, M., Kosovac, A., & Hartley, K. (2021). City Diplomacy: Another Generational Shift? *Diplomatica*, 3(1), 137–146. <https://doi.org/10.1163/25891774-03010007>
- Acuto, M., Morissette, M., & Tsouros, A. (2017). City Diplomacy: Towards More Strategic Networking? Learning with WHO Healthy Cities. *Global Policy*, 8(1), 14–22. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12382>
- Aldecoa, F., & Keating, M. (1999). *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments*. Routledge.
- Alger, C. F. (2014). The Impact of Cities on International Systems. In *The UN System and Cities in Global Governance* (pp. 35–57). Springer Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-00512-6\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-319-00512-6_3)

- Amiri, S. (2022). City Diplomacy: An Introduction to the Forum. *The Hague Journal of Diplomacy*, 17(1), 91–95. <https://doi.org/10.1163/1871191X-bja10090>
- Anttiroiko, A. (2015). City Branding as a Response to Global Intercity Competition. *Growth and Change*, 46(2), 233–252. <https://doi.org/10.1111/grow.12085>
- Asdourian, B., & Ingenhoff, D. (2020). A Framework of City Diplomacy on Positive Outcomes and Negative Emotional Engagement: How to Enhance the International Role of Cities and City/Mayor Branding on Twitter? In S. Amiri & E. Sevin (Eds.), *City Diplomacy Current Trends and Future Prospects* (pp. 83–109). Palgrave Macmillan. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-45615-3\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-030-45615-3_5)
- Beaverstock, J. V., Smith, R. G., & Taylor, P. J. (1999). A roster of world cities. *Cities*, 16(6), 445–458. [https://doi.org/10.1016/S0264-2751\(99\)00042-6](https://doi.org/10.1016/S0264-2751(99)00042-6)
- Chaloux, A., & Paquin, S. (2013). Green paradiplomacy and water resource management in North America: the case of the Great Lakes-St. Lawrence River Basin. *Canadian Foreign Policy Journal*, 19(3), 308–322. <https://doi.org/10.1080/11926422.2013.845582>
- Charountaki, M. (2022). Conceptualising Non-State Actors in International Relations. In M. Charountaki & D. Irrera (Eds.), *Mapping Non-State Actors in International Relations. Non-State Actors in International Relations* (pp. 1–16). Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-91463-9\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-91463-9_1)
- Charountaki, M., & Havlová, R. (2022). States-to-be as Foreign Policy Actors. In M. Charountaki & D. Irrera (Eds.), *Mapping Non-State Actors in International Relations. Non-State Actors in International Relations* (pp. 95–110). Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-91463-9\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-030-91463-9_6)
- Chiu, S. W., & Siu, K. Y. (2022). *Hong Kong Society*. Springer Nature Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-16-5707-8>
- Constitutional and Mainland Affairs Bureau. (n.d.). *HKSAR's External Affairs article 151*. Constitutional and Mainland Affairs Bureau. Retrieved June 15, 2024, from <https://www.cmab.gov.hk/en/issues/external4.htm>
- Cremer, R. D., De Bruin, A., & Dupuis, A. (2001). International Sister-Cities: Bridging the Global-Local Divide. *The American Journal*

- of Economics and Sociology*, 60(1), 377–401. <https://doi.org/10.1111/1536-7150.00066>
- Criekemans, D. (2018). The Diplomatic Activities of Regional Substate Entities: In *Borders and Margins* (pp. 131–152). Verlag Barbara Budrich. <https://doi.org/10.2307/j.ctvddzgdk.13>
- Cullis, S., Meyer, C., & Clausen, D. (2023). The Global Relations of Cities in Nagasaki Prefecture: A Survey of 10 Cities. (*Journal of the Research Center for Shin-Nagasaki Studies*) , 3, 3–22.
- Curtis, S. (2014). Introduction: Empowering Cities. In S. Curtis (Ed.), *The power of cities in international relations* (1st ed., pp. 1–15). Routledge.
- Fantoni, M., & Avellaneda, C. (2022). Explaining paradiplomacy: do local pro-international structures and political support matter? *Global Public Policy and Governance*, 2(3), 353–375. <https://doi.org/10.1007/s43508-022-00044-z>
- GaWC. (2020). *The World According to GaWC 2020*. <https://www.lboro.ac.uk/microsites/geography/gawc/world2020t.html>
- GovHK. (2022, November 4). *Government launches measures to inject new power into Hong Kong cinema*. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region. <https://www.info.gov.hk/gia/general/202211/04/P2022110400201.htm>
- GovHK. (2024, March 25). *Speech by CE at Hong Kong International Cultural Summit*. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region. <https://www.info.gov.hk/gia/general/202403/25/P2024032500236.htm>
- Grandi, L. K. (2020). City Diplomacy: A Strategic Choice. In *City Diplomacy* (pp. 1–35). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-60717-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-60717-3_1)
- Henderson, J. (2017). Global cities, Tokyo, urban tourism. *International Journal of Tourism Cities*, 3(2), 143–157. <https://doi.org/10.1108/IJTC-01-2017-0006>
- Herrschel, T., & Newman, P. (2017). *Cities as International Actors*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-39617-4>
- Hill, R. C., & Kim, J. W. (2000). Global Cities and Developmental States: New York, Tokyo and Seoul. *Urban Studies*, 37(12), 2167–2195. <https://doi.org/10.1080/00420980020002760>

- Hong Kong Film Development Council. (2024, June 14). *Hong Kong-Europe-Asian Film Collaboration Funding Scheme*. Hong Kong Film Development Council. [https://www.fdc.gov.hk/en/applications\\_detail.php?id=2024020109022664697](https://www.fdc.gov.hk/en/applications_detail.php?id=2024020109022664697)
- Isnarti, R., & Trisni, S. (2020). The City of Padang Challenges For Paradiplomacy. *AEGIS : Journal of International Relations*, 4(2). <https://doi.org/10.33021/aegis.v4i2.1247>
- Japan National Tourism Organization. (2023). *Visit Rate Ranking by Prefecture*. Japan National Tourism Organization . <https://statistics.jnto.go.jp/en/graph/#graph--inbound--prefecture--ranking>
- Joo, Y.-M. (2023). Seoul Pursuing and sharing a global city. In R. Hu (Ed.), *Routledge Handbook of Asian Cities* (pp. 115–125). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003256533>
- Klaus, I. (2022). The State of City Diplomacy. *Urbanisation*, 7(1\_suppl), S61–S66. <https://doi.org/10.1177/2455747120913186>
- Kresl, P. K., & Ietri, D. (2016). *Smaller Cities in a World of Competitiveness*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315727387>
- Kuznetsov, A. S. (2015). *Theory and Practice of Paradiplomacy Subnational governments in international affairs*. Routledge.
- La Porte, T. (2013). City Public Diplomacy in the European Union. In M. K. D. Cross & J. Melissen (Eds.), *European Public Diplomacy* (pp. 85–111). Palgrave Macmillan US. [https://doi.org/10.1057/9781137315144\\_5](https://doi.org/10.1057/9781137315144_5)
- Lee, J. H., Hancock, M. G., & Hu, M.-C. (2014). Towards an effective framework for building smart cities: Lessons from Seoul and San Francisco. *Technological Forecasting and Social Change*, 89, 80–99. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2013.08.033>
- Leffel, B. (2021). Principles of Modern City Diplomacy and The Expanding Role of Cities in Foreign Policy. *Journal of International Affairs*, 74(1), 179–200.
- Lin, K. P. Y. (2008). Global City Review: Hong Kong as a Global City. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1101011>
- Ljungkvist, K. (2014). The Global City: From Strategic Site to Global Actor. In S. Curtis (Ed.), *The power of cities in international relations* (pp. 32–56). Routledge.
- Ljungkvist, K. (2019). *Security in the Age of Cities*. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1509447/FULLTEXT01.pdf>

- Lorentzen, A., & van Heur, B. (2012). Introduction: cultural political economy of small cities. In *Cultural Political Economy of Small Cities*. Routledge.
- Manfredi-Sánchez, J. L. (2023). Urban Diplomacy: How Cities Will Leverage Multilateralism. In P. W. Hare, J. L. Manfredi-Sánchez, & K. Weisbrode (Eds.), *The Palgrave Handbook of Diplomatic Reform and Innovation. Studies in Diplomacy and International Relations* (pp. 581–600). Palgrave Macmillan, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-10971-3\\_29](https://doi.org/10.1007/978-3-031-10971-3_29)
- Marchetti, R. (2021). *City Diplomacy From City-States to Global Cities*. University of Michigan Press. <https://doi.org/10.3998/mpub.11991621>
- Meyer,D.,&Lee,J.(2024,April1).HK'sfutureasbusinesscentersecureunder "one country, two systems." China Daily . <https://www.chinadaily.com.cn/a/202404/01/WS660a088ba31082fc043bfaf4.html>
- Meyer, D. R. (2002). Hong Kong: Global Capital Exchange. In S. Sassen (Ed.), *Global Networks, Linked Cities*. Routledge.
- Pooch, M. U. (2016). Global Cities as Cultural Nodal Points . In *DiverCity – Global Cities as a Literary Phenomenon: Toronto, New York, and Los Angeles in a Globalizing Age*. Transcript Verlag. <https://www.jstor.org/stable/j.ctv1wxt87.1?seq=5>
- Robinson, T., & Ji, M. (2022). *Sharing Seoul: Going Global with Sharing Economy Innovations* (pp. 161–178). Springer Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-13595-8\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-031-13595-8_7)
- Sampaio, A. (2016). Before and after urban warfare: Conflict prevention and transitions in cities. *International Review of the Red Cross*, 98(901), 71–95. <https://doi.org/10.1017/S1816383117000145>
- Sassen, S., & Lynd, R. S. (2010). What makes a Global City Global? *Foreign Policy*, 18.
- Sevin, E. (2021). The missing link: cities and soft power of nations. *International Journal of Diplomacy and Economy*, 7(1), 19–32. <https://doi.org/10.1504/IJDIPE.2021.114826>
- Sevin, E., & Amiri, S. (2023). City diplomacy. In *A Research Agenda for Public Diplomacy* (pp. 75–89). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781802207323.00012>
- Shackleton, L. (2021, March 10). *Hong Kong's Once Mighty Film Industry Grapples With Changing Market & Political Realities*. Deadline

- <https://deadline.com/2024/03/hong-kong-film-industry-china-market-challenges-1235851011/>
- Sohaela, A., & Grandi, L. K. (2021). Cities as Public Diplomacy Actors Combining Moral “Good” with Self-interest. In C. Alexander (Ed.), *The Frontiers of Public Diplomacy* (pp. 146–158). Routledge.
- Song, J. (2020). *Global Tokyo*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-3495-9>
- Surmacz, B. (2018). City diplomacy. *Barometr Regionalny*, 16(1).
- Tamari, T. (2017). Japanese cultural policy, nation branding and the creative city. In V. Durrer, T. Miller, & D. O'Brien (Eds.), *The Routledge Handbook of Global Cultural Policy* (pp. 558–576). Routledge.
- Tamotsu, A. (2002). Shanghai’s soft power shows the way forward. *Japan Echo*, 29(3), 58–62.
- TMG. (2023). *Industry and Employment in Tokyo A Graphic Overview*. <https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/f5b3c112ace253719216769ebb6d3c48.pdf>
- Ursic, M., & Imai, H. (2020a). Going Local 4: The Significance of Local Soft Environmental Factors for Tokyo’s Creative Capacity. In *Creativity in Tokyo* (pp. 203–223). Springer Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-15-6687-5\\_8](https://doi.org/10.1007/978-981-15-6687-5_8)
- Ursic, M., & Imai, H. (2020b). Tokyo as a Matured City: Torn Between Global Change and Local Lives. In *Creativity in Tokyo* (pp. 21–52). Springer Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-15-6687-5\\_2](https://doi.org/10.1007/978-981-15-6687-5_2)
- van der Pluijm, R., & Melissen, J. (2007). *City Diplomacy. The Expanding Role of Cities in International Politics* (10). [https://www.clingendael.org/sites/default/files/2016-02/20070400\\_cdsp\\_paper\\_pluijm.pdf](https://www.clingendael.org/sites/default/files/2016-02/20070400_cdsp_paper_pluijm.pdf)
- Wang, K. J. (2020). *Hong Kong Popular Culture Worlding Film, Television, and Pop Music*. Palgrave Macmillan.
- Yeh, Y.-Y., & Davis, D. W. (2002). Japan Hongscreen: Pan-Asian cinemas and flexible accumulation. *Historical Journal of Film, Radio and Television*, 22(1), 61–82. <https://doi.org/10.1080/01439680220120291>
- Yun, J. (2017). *Globalizing Seoul*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315205724>